

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tujuan utama dalam pembangunan ekonominya, yakni untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Negara Astuti et al., (2023). Masalah utama yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi adalah lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam akses terhadap peluang kerja.

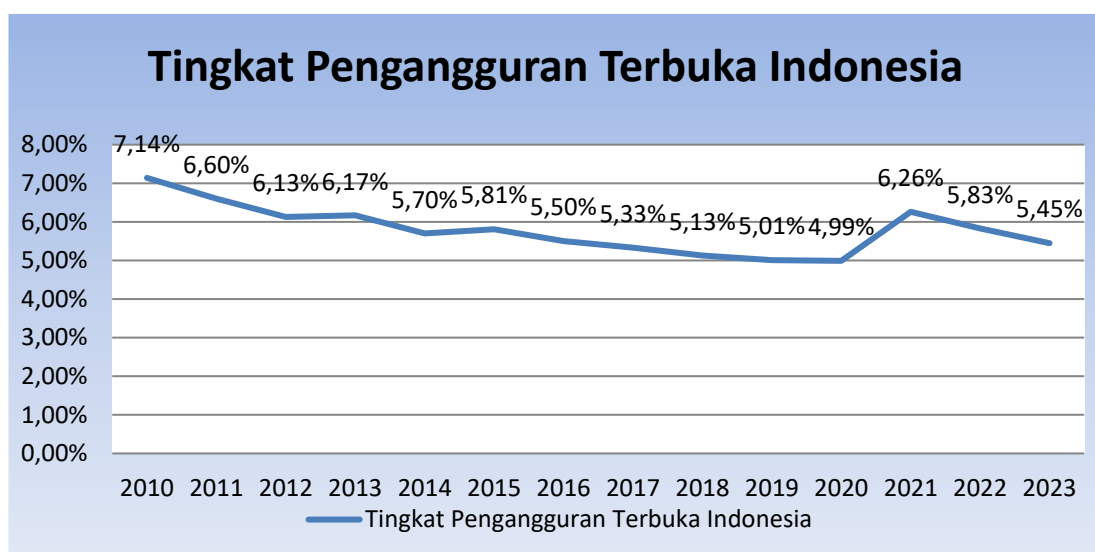
Perkembangan jumlah tenaga kerja tidak seiring dengan kemajuan yang berlangsung di berbagai bidang. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu hambatan dalam upaya kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Ketidakmampuan individu dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya meskipun telah aktif mencarinya merupakan definisi pengangguran dalam konteks ketenagakerjaan. Hal ini terjadi ketika jumlah orang mencari pekerjaan melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia atau ketika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang serius yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masalah pengangguran juga terjadi pada Negara maju tidak hanya terjadi pada

Negara yang berkembang. Di Indonesia, meskipun pemerintah sudah berupaya untuk melakukan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi angka pengangguran, akan tetapi tantangan ini tetap belum sepenuhnya teratasi. Setiap tahunnya, angka pengangguran tetap menunjukkan angka yang signifikan, khususnya di kalangan angkatan kerja muda, yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan perekonomian.

Pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Dampak ekonomi yang signifikan terlihat dari penurunan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan beban pemerintah dalam menyediakan program jaminan sosial. Selain itu, pengangguran juga memperburuk ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi, meningkatkan stres dan gangguan psikologis pada individu, serta mempengaruhi hubungan sosial. Pengangguran yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran sangat kompleks, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, krisis ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi pengangguran, namun hasilnya masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami penyebab pengangguran dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menguranginya.

Dampak dari masalah ini dapat meliputi ketidakstabilan pendapatan, penurunan daya beli, serta perlambatan pertumbuhan Septiana & Asmara, (2024). Cara membuktikan permasalahan pengangguran tersebut maks bisa Menyaksikan angka pengangguran terbuka di Indonesia yang tertera di bawah ini:



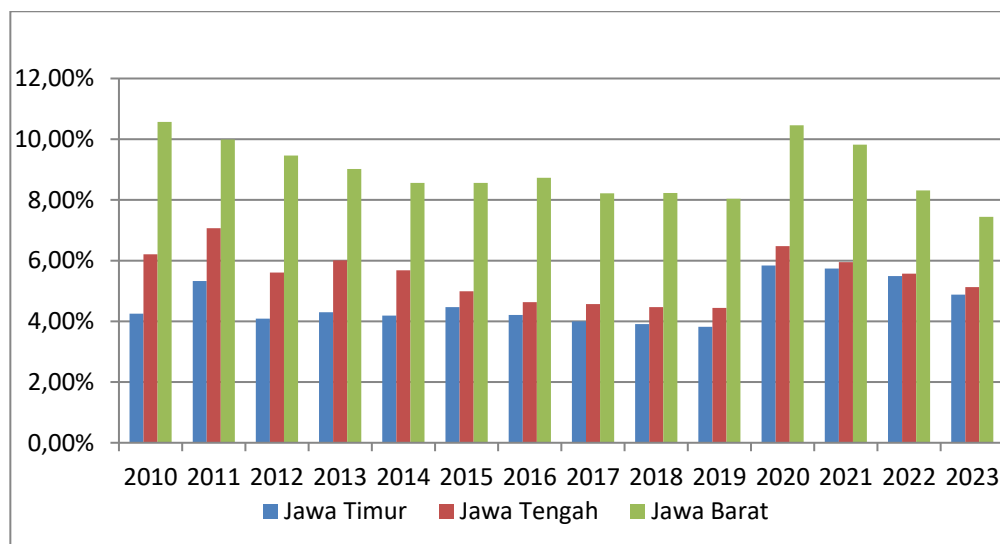
Sumber: BPS Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023

Menurut ilustrasi pada Gambar 1.1 di atas, apabila kita perhatikan, angka tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cenderung berfluktuasi atau dapat dikatakan mengalami naik turun. Data yang tercantum menunjukkan bahwa belum tampak adanya penurunan yang signifikan, atau belum ada perkembangan yang berarti dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Persentase pengangguran yang terendah dapat terlihat antara tahun 2018 hingga 2020. Namun, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia kembali

meningkat pada tahun 2021, walaupun akhirnya dapat menurun kembali pada tahun 2022 sampai 2023.

Beberapa provinsi di Indonesia juga sedang mengalami permasalahan yang sama, Salah satunya adalah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara mengamati data berikut terkait isu tingkat pengangguran yang tampak di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2010 hingga 2023, yaitu sebagai berikut:



Sumber: (cilacapkab.bps.go.id, 2024); (jatim.bps.go.id, 2023a, 2023b); (Data diolah)

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur angkanya hampir sebanding dengan angka pengangguran terbuka di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang keduanya menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada grafik 1.2 di atas, data menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur hingga saat ini, pada periode-periode tertentu,

masih menunjukkan perubahan naik turun antara tahun 2010 hingga 2023. Hal tersebut terlihat tidak adanya penurunan yang secara signifikan.

Apabila dianalisis dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, dapat diamati bahwa Jawa Timur memiliki angka pengangguran terbuka yang lebih rendah. Proporsi pengangguran terbuka di Jawa Timur hampir setara dengan Jawa Tengah, dengan perbedaan yang sangat kecil, terutama sejak tahun 2015 hingga 2023. Sedangkan antara persentase di Jawa Barat dan Jawa Timur mengenai tingkat pengangguran terbuka masih terpaut cukup jauh selisihnya. Wilayah Jawa Barat menunjukkan angka yang signifikan, dengan persentase yang melebihi 10%. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami fluktuasi yang relatif kecil antara tahun 2012 hingga 2019. Namun, angka tersebut kembali naik pada tahun 2020, mencapai 2%, meskipun akhirnya menunjukkan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga 2023. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Jawa Timur belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Untuk Jawa Barat sudah bisa kembali, padahal Jawa Barat yang struktur perekonomiannya relatif sama dengan Jawa Timur itu bahkan bisa lebih rendah daripada masa sebelum pandemi Covid 19 tahun 2018 sebesar 8,23% dan tahun 2023 menjadi 7,44%. Untuk Jawa Tengah sebelumnya sama, cuman untuk Jawa Tengah ini agak beda struktur perekonomiannya dengan Jawa Timur dan Jawa Barat jika dilihat dari PDRB Jawa Tengah paling kecil.

Menurut Suhendra & Wicaksono, (2016) Terdapat beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang bisa berpengaruh pada tingkat pengangguran yaitu antara lain: Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan di pasar, meskipun

terdapat (mismatch) bagi permintaan para pekerja. Yang kedua, mengenai permasalahan upah bagi para pekerja yang berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap pengangguran. Selanjutnya yang ketiga yaitu inflasi yang membantu mendorong para perusahaan dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja untuk melakukan efisiensi. Terakhir, sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan baru itu disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu semakin banyaknya tenaga kerja belum bisa diserap bagi peningkatan kesempatan kerja yang tersedia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat sejumlah parameter ekonomi yang diperkirakan memengaruhi laju pengangguran, antara lain: PDRB, level pendidikan, laju inflasi, dan upah minimum. Saat ini, seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur tengah menghadapi tantangan besar terkait sektor ketenagakerjaan. Berikut ini adalah informasi yang diambil dari Badan Pusat Statistik mengenai PDRB, tingkat pendidikan, dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur pada rentang tahun 2010-2023:

Tabel 1 1

PDRB, Rata-rata Lama Sekolah, Inflasi, Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Inflasi (yoy)	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
2010	990.648,84	6,73	5,85	630.000
2011	1.054.401,77	6,79	4,09	705.000
2012	1.124.464,64	6,85	4,5	745.000
2013	1.192.789,80	6,9	7,59	866.250
2014	1.262.684,50	7,05	7,77	1.000.000
2015	1.331.376,10	7,14	3,08	1.000.000
2016	1.405.563,51	7,23	2,74	1.273.490
2017	1.432.299,58	7,34	4,04	1.388.000
2018	1.563.441,82	7,39	2,86	1.508.895
2019	1.649.895,64	7,59	2,12	163.059
2020	1.611.392,55	7,78	1,44	1.768.777
2021	1.668.754,36	7,88	2,45	1.868.777
2022	1.757.874,93	8,03	6,52	1.891.567
2023	1.844.808,67	8,11	2,92	2.040.244

Sumber: (jatim.bps.go.id, 2024) ;(jatim.bps.go.id, 2023); (probolinggokab.bps.go.id, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat PDRB Jawa Timur setiap tahunnya mengalami fluktuasi (naik-turun) dapat dilihat pada tahun 2010-2014 PDRB meningkat yang disebabkan oleh peningkatan produksi industri, terutama industri manufaktur, serta peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat dan terus meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2019 yaitu dikarenakan peningkatan harga komoditas global, seperti minyak bumi dan biji-bijian, yang meningkatkan pendapatan petani dan industri. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB tetap menurun dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan produksi industri, penurunan investasi dan konsumsi masyarakat, serta penurunan harga komoditas global. Akan tetapi pada tahun 2021-2023 PDRB kembali meningkat yaitu disebabkan oleh peningkatan produksi industri, terutama industri manufaktur, serta peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Dalam penelitian Zuliasari & Rachmawati, (2021) teori Samuelson mengatakan bahwa salah satu indikator yang mempengaruhi angka pengangguran yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ialah jumlah estimasi hasil bersih perekonomian dari semua kegiatan ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto menggambarkan kapasitas suatu kabupaten untuk menangani aset normalnya, sehingga ukuran PDRB yang dihasilkan di setiap daerah sangat bergantung pada variabel-variabel penciptaan potensial di wilayah tersebut. Hal tersebut karena inventaris faktor penciptaan yang terbatas di suatu kabupaten, ukuran PDRB berfluktuasi di setiap daerah. Sitompul et al., (2023) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Sedangkan menurut penelitian Valentine, (2018) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Sehingga hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan apakah PDRB itu berpengaruh positif atau negatif terhadap pengangguran maka dari itu dengan adanya gap riset/gap penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan analisis pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran.

Variabel kedua yang mempengaruhi pengangguran yaitu Tingkat Pendidikan yang dilihat dari Rata-rata lama sekolah di Jawa Timur yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2023 yaitu disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dan peningkatan investasi dalam pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas guru.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi juga kemampuan kerja (the working capacity) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan yang diselesaikan oleh seseorang merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini ialah rata-rata lama sekolah sebab semakin lama seseorang bersekolah, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Namun, fenomena menarik yang dapat diamati di beberapa negara adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan mereka menjadi pengangguran. Fenomena ini dikenal sebagai "Paradoks Pendidikan". Di beberapa negara Afrika dan Asia, penelitian telah menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Hal ini tampaknya bertentangan dengan asumsi umum bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Penyebab fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi, peningkatan harapan dan ekspektasi yang lebih tinggi tentang gaji, jabatan, dan lingkungan kerja, serta struktur ekonomi yang tidak mendukung. Fenomena "Paradoks Pendidikan" ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara

tingkat pendidikan dan pengangguran, serta strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja yang sesuai bagi lulusan pendidikan tinggi. Mustakim, (2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Egeten et al., (2023) pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan hasil analisis sehingga hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan apakah tingkat pendidikan itu berpengaruh positif atau negatif terhadap pengangguran maka dari itu dengan adanya gap riset/gap penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran.

Variabel yang ketiga yang mempengaruhi pengangguran yaitu Inflasi. Jika dilihat dari tabel 1.1 terlihat bahwa persentase inflasi di Jawa Timur mengalami naik turun selama 14 tahun terakhir. Pada tahun 2010-2013 inflasi relatif tinggi yaitu disebabkan oleh peningkatan harga komoditas global, seperti minyak bumi dan biji-bijian. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang, namun kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengendalikan inflasi. Akan tetapi di tahun 2014-2019 inflasi menurun yaitu dikarenakan pemerintah melakukan kebijakan untuk mengendalikan inflasi, seperti mengatur harga BBM dan mengembangkan program bantuan sosial. dan kebijakan moneter yang tepat, seperti menurunkan suku bunga dan mengembangkan program quantitative easing. Hal ini berlanjut sampai tahun 2021 inflasi menurun drastis karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Akan tetapi inflasi kembali meningkat pada tahun 2022 yang disebabkan oleh perang Rusia-

Ukraina sehingga menyebabkan harga komoditas global kembali meningkat. dan di tahun 2023 Inflasi kembali menurun yaitu disebabkan harga komoditas global kembali menurun.

Menurut Mulyani, (2020) Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus atau suatu peristiwa moneter yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu. Tingginya inflasi disertai dengan keterkaitan dampak negatifnya menyebabkan pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap laju inflasi karena nantinya akan berpengaruh terhadap pemerintah dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya natural inflation, human eror inflation, cost push inflation, imported inflation Endang & Agustin, (2023). Inflasi merupakan faktor penyebab naiknya harga biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini berpotensi dalam mendorong terjadinya penurunan terhadap penggunaan faktor produksi (termasuk tenaga kerja).

Adapun penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Kuntiarti, (2018) Artinya, disampaikan bahwa inflasi memiliki dampak yang merugikan dan tidak berpengaruh besar terhadap angka pengangguran di Provinsi Banten pada periode 2010-2015. Sementara itu, menurut Valentine, (2018) inflasi memberikan dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka a, Melalui kedua penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan hasil analisis sehingga terdapatnya gap riset/gap penelitian terdahulu, oleh sebab itu diperlukan menganalisis pengaruh inflasi pada tingkat pengangguran.

Variabel keempat yang mempengaruhi pengangguran yaitu Upah Minimum. Jika dilihat dari data tabel diatas Upah Minimum yang terjadi di Jawa Timur setiap tahunnya naik dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar Rp 878.895. Namun pada tahun 2019 turun drastis menjadi Sebesar Rp 163.059 dan naik kembali pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar Rp 2.040.244. Angka tersebut menjadi kenaikan upah minimum tertinggi selama 14 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 sampai 2023. Peningkatan gaji akan disertai dengan penurunan permintaan tenaga kerja, yang berarti bisa menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, penurunan gaji akan memicu peningkatan permintaan terhadap pekerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap memiliki hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Gaji mempengaruhi besarnya angkatan kerja yang terlibat dalam pekerjaan. Semakin tinggi gaji yang ditentukan, maka akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Akibatnya, untuk mengurangi pengeluaran, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja, yang berujung pada tingginya angka pengangguran. Secara negatif dan signifikan, hal ini berhubungan dengan pengangguran, yang artinya jika UMR naik, maka tingkat pengangguran di DIY akan menurun. Berdasarkan studi Valentine, (2018) menyatakan bahwa UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila UMR meningkat, maka pengangguran di DIY akan turun. Berdasarkan studi Rahmawati, (2017) ditemukan bahwa UMK memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Terdapat perbedaan hasil analisis antara dua penelitian sebelumnya, yang mengarah pada identifikasi adanya celah riset. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh upah minimum terhadap angka pengangguran.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi untuk memperdalam pemahaman tentang topik ini. Pertama, penelitian sebelumnya belum membahas tentang pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur secara spesifik. Kedua, penelitian sebelumnya belum menggunakan data yang lebih terkini, yaitu data dari tahun 2010-2023. Ketiga, penelitian sebelumnya belum menggunakan metode kuantitatif yang lebih canggih, seperti analisis regresi linear berganda dan juga teknik analisis data yang lebih terkini, seperti analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software seperti STATA. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan membahas lebih spesifik pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur dengan menggunakan data terkini yaitu dari tahun 2010-2023 dan tentunya juga menggunakan teknik analisis data yang lebih terkini yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda seperti STATA yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul, pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur 2010-2023.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dirumuskan masalah-masalah yang sesuai dengan penelitian di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023.
4. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menambah wawasan untuk peneliti maupun pembaca mengenai pentingnya permasalahan pengangguran terbuka serta pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2010-2023.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Sebagai materi evaluasi atau data yang berguna bagi instansi terkait, salah satunya dalam menentukan keputusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber acuan bagi para peneliti di masa depan serta berpotensi memperkaya wawasan dalam bidang ilmu ekonomi.